

Penerapan Satuan Kredit Semester (SKS) di Sekolah Menengah

Oleh: Mariati*)

Abstrak: Rancang program SKS telah diuji cobakan sejak tahun ajaran 2004/2005 pada 17 SMA di Mataram oleh Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan tiga SMA di DKI Jakarta pada tahun ajaran 2007/2008. Studi ini dilakukan untuk mengkaji penerapan SKS di Mataram dan Jakarta yang dilaksanakan pada tahun 2007. Sasaran studi berjumlah 64 orang yang terdiri dari staf dinas pendidikan yang menangani program SKS, kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru mata pelajaran dan pakar dari perguruan tinggi yang menjadi nara sumber atau patner sekolah. Data dikumpulkan dengan menggunakan angket dan diskusi fokus secara kelompok. Teknik analisis data untuk memperoleh hasil kajian digunakan teknik analisis deskriptif. Hasil studi menunjukkan bahwa sekolah antusias melaksanakan SKS karena kemandirian peserta didik meningkat. Namun demikian, masih terdapat perbedaan dalam hal: (a) pelaksanaan SKS dan beban belajar SKS, (b) penerapan jumlah sks yang berbeda-beda, (c) program akselerasi dan pengayaan, (d) kurang tersedianya SDM di sekolah yang mampu untuk merancang kurikulum, (e) belum tersedianya buku petunjuk dari pemerintah, (f) belum terpenuhinya sarana dan prasaranan, (g) belum siapnya sistem administrasi sekolah, serta (h)beragamnya pemahaman stakeholder tentang SKS.

Kata kunci: Penerapan, sistem satuan kredit semester, sekolah menengah

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perubahan merupakan tantangan dunia pendidikan saat ini. Sekolah-

sekolah pada masa lalu cenderung menganut pola keseragaman, misalnya ditunjukkan dengan ruangan kelas berbentuk dan

*) Mariati adalah tenaga fungsional peneliti bidang pendidikan pada Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas

berukuran sama, waktu pembelajaran sama ditandai dengan bunyi bel, dengan rotasi tegas pada awal dan akhir hari-hari belajar. Pembelajaran direncanakan secara sentral dan para gurulah yang dominan, sedangkan peserta didik adalah pembelajar yang pasif; pembelajaran adalah produk bukan proses; keseragaman didukung; struktur kurikulum kaku dan pengelompokan usia mendominasi pembelajaran. Sementara beberapa keseragaman ini ada yang dipertahankan, pendidikan yang sudah dikonsep ulang telah dipengaruhi oleh penelitian tentang: bagaimana otak bekerja dan bagaimana pengorganisasian maju dan pesat, beragam kecerdasan dan aneka ragam cara belajar; kecerdasan emosional; teknologi baru dalam belajar (*e-learning*; internet; dan web). Sekolah yang dikonsep ulang akan memanfaatkan perkembangan yang baru dan mengasikkan ini untuk membantu kemampuan dan pembelajaran yang unik bagi tiap peserta didiknya. Salah satu asumsi yang ada di sekolah yang sudah dikonsep ulang adalah pembelajaran yang menghormati talenta peserta didik, bekerja dengan mereka secara individual, menyediakan bagi mereka pengalaman belajar yang autentik dan menghadapkan mereka isu-isu yang nyata pada

komunitas global. Sekolah-sekolah perlu dikonsep ulang (Daryl Forde: *The Jakarta Post* 06/05/07). Menurut Forde sekolah yang dikonsep ulang kurikulum akan lebih bernilai seperti pertanyaan daripada jawaban, kreativitas ketimbang kemampuan mengingat, individualitas di atas keseragaman dan pada kesempurnaan daripada prestasi yang distandarkan.

Di Indonesia sistem pengelolaan pembelajaran saat ini di semua satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada umumnya menggunakan sistem paket, di mana semua peserta didik menempuh sistem pembelajaran yang sama dengan jumlah mata pelajaran yang sama dan menyelesaikan program belajarnya dalam waktu yang bersamaan pula. Faktanya peserta didik di SMA dibebani dengan 17 mata pelajaran wajib per semester dengan tingkat kesulitan dan kedalaman yang sama semuanya harus diikuti. Realitas penyelenggaraan pendidikan ini dihadapkan dengan peserta didik yang memiliki bakat, minat, dan kemampuan intelektual yang berbeda sehingga menuntut adanya pendekatan yang berbeda dalam pelaksanaan kurikulum. Peserta didik yang memiliki kemampuan intelektual tinggi dapat belajar

lebih mendalam dan memiliki kesempatan untuk lebih maju dan berkembang dibanding peserta didik lainnya. Sebaliknya, peserta didik yang lemah tidak merasa dipaksa untuk mengikuti peserta didik lain yang lebih mampu.

Salah satu cara guna menjawab tantangan pelayanan individual dan kemajemukan peserta didik, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Depdiknas, 2003) dalam Pasal 12 ayat 1 butir (b) mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya serta menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Pelayanan dimaksud adalah penyelenggaraan sistem satuan kredit semester (SKS) yang dicanangkan untuk memenuhi pelayanan pendidikan yang individual, demokratis dan adil kepada peserta didik. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 11 ayat (1) menyatakan "Beban belajar untuk SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester". Selanjutnya pada ayat (2) dan ayat (3): "Beban

belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada pendidikan formal kategori standar dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester, Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada pendidikan formal kategori mandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester" (Depdiknas, 2005)

Gaung sistem SKS di sekolah menengah telah terdengar sejak tahun ajaran 2004/2005 di mana ada sekitar 17 SMA di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) menguji coba sistem ini secara mandiri. Pada tahun ajaran 2007/2008 selain NTB beberapa daerah berinisiatif melaksanakan program ini termasuk Surabaya dan DKI Jakarta. Di Jakarta, tiga SMA sudah siap menggunakan SKS (Sinar Harapan 17 Juli 2007).

Pada awal pelaksanaan SKS di NTB, Zaini Arony pada saat itu sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB menyatakan optimis dengan sistem ini karena pendidikan seharusnya menganut asas temporer, yang berarti perubahan selalu dilakukan sebab tiap zaman, karena tiap zaman memiliki caranya sendiri. Dampak Penerapan SKS menurut beliau mengakibatkan perubahan pola mengajar di kalangan

pendidik dan adanya pelayanan individual bagi peserta didik. Namun di sisi lain perlu peningkatan kompetensi guru dan penambahan ruang kelas (<http://suarantb.com>). Dalam perjalanan waktu pelaksanaan uji coba program SKS umumnya sekolah masih bingung melaksanakan sistem baru ini karena belum adanya payung aturan yang jelas dari pemerintah pusat, kadang-kadang sebagian guru masih ragu apakah sistem ini benar-benar dapat dilaksanakan (<http://kompas.com>). Berbagai daerah menyatakan siap melaksanakan sistem ini apabila sudah ada petunjuk yang jelas dari pusat (<http://balipost.co.id>).

Agar ada kesamaan pandangan dalam melaksanakan SKS, pada tahun 2005 Dikpora provinsi Nusa Tenggara Barat, menerbitkan buku Pedoman Pelaksanaan Sistem Kredit Semester di SMA. Dikpora NTB mengakui ada beberapa kendala atau kelemahan yang ditemui pada uji coba SKS antara lain tugas guru yang lebih berat karena harus bertindak selaku pembimbing akademik menghadapi peserta didik secara individual, melakukan bimbingan pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, serta administrasi sekolah yang agak rumit bila dibandingkan dengan sistem paket. Bagi peserta didik

sistem ini menuntut mereka untuk lebih mandiri, aktif untuk mencari buku-buku referensi, aktif dalam diskusi kelompok dengan teman sekelas, serta lebih sering bertanya pada guru (<http://kompas.com>). Bagi peserta didik yang memiliki kemampuan lebih SKS merupakan kabar menggembirakan karena mereka tidak perlu menghabiskan waktu tiga tahun untuk menyelesaikan studinya serta memungkinkan memilih mata pelajaran yang diminati dalam porsi yang besar (<http://waspada.co.id>). Ada juga yang beranggapan bahwa penerapan SKS di sekolah menengah dianggap suatu terobosan baru bagi perkembangan pendidikan di Indonesia yang dapat dijadikan tonggak kebangkitan sumber daya manusia di Indonesia, antara lain karena potensi peserta didik dapat dimanfaatkan secara optimal dan lama waktu tempuh sekolah ditentukan oleh kemampuan peserta didik itu sendiri. Bagi sekolah (SMA) yang terpencil tetapi memiliki peserta didik yang berprestasi dengan sistem ini dapat bersaing dengan SMA yang ada di pulau Jawa (<http://pauaxxx.wordpress.com>).

Namun beberapa pengamat pendidikan menilai penerapan SKS di sekolah menengah terlalu dini dan bukan untuk memecahkan masalah

yang ada. Walaupun sistem SKS dipandang sesuai untuk sekolah menengah kelengkapan infrastrukturnya dipenuhi dahulu antara lain kurikulumnya, sistem administrasi, ruang kelas, laboratorium, jumlah guru, serta sarana prasarana lainnya, termasuk sosialisasi kepada sekolah (Jawa Pos, Jumat 17 Desember 2004). Kenyataan ini ditunjukkan dengan pemahaman yang bervariasi tentang konsep dan penerapan SKS, pemahaman jumlah beban belajar yang berbeda-beda serta jumlah sks yang ditempuh peserta didik selama 6 semester tidak sama pada tiap daerah. Di Mataram jumlah sks selama 6 semester adalah 218 – 220 sks, di SMAN 1 Surabaya jumlah sks yang ditempuh selama 6 semester adalah 230 sks (<http://dispendik.surabaya.go.id>). Sedangkan di SMA N 78 Jakarta jumlah sks yang harus ditempuh peserta didik di SMA sebesar 120 sks (Sinar Harapan 17 Juli 2007). Jumlah sks yang berbeda pada tiap jurusan misalnya di Mataram jumlah sks di SMA kelompok IPS dan Bahasa sebesar 218 sks, sedangkan untuk kelompok IPA sebesar 220 sks (Buku I Pedoman Umum Sistem Kredit Semester hal. 10 -11).

1.2 Permasalahan

Mengacu pada latar belakang yang menunjukkan adanya antusias beberapa sekolah di NTB dan Jakarta melaksanakan SKS, hal ini menarik untuk diteliti. Walaupun dalam kenyataannya masih ditemukan kepala sekolah dan guru yang meragukan manfaat SKS dan masing-masing sekolah masih bervariasi dalam pemahaman konsep dan pelaksanaan SKS. Sehubungan dengan hal tersebut masalah utama yang dikaji dalam studi ini adalah pemahaman konsep dan pelaksanaan SKS, sedangkan secara khusus studi akan mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan: (1) Apa pengertian SKS yang dipahami oleh sekolah? (2) Apa saja esensi atau manfaat penerapan SKS? (3) Bagaimana penerapan SKS di SMP/MTs? (4) Bagaimana penerapan SKS di SMA/MA? (5) Apa kekuatan dan kelemahan SKS? (6) Apa kendala pelaksanaan SKS di sekolah? dan (7) Bagaimana persepsi sekolah tentang program akselerasi, pengayaan, dan remedial dalam SKS?

1.3 Tujuan Studi

Secara umum studi ini bertujuan untuk melakukan pengkajian yang menyeluruh terhadap penerapan SKS di sekolah. Secara khusus

pengkajian meliputi: (1) Pengertian SKS yang dipahami oleh sekolah (2) Persepsi sekolah tentang esensi atau manfaat Penerapan SKS (3) Pendapat sekolah tentang Penerapan SKS di SMP/MTs (4) Penerapan SKS di SMA/MA (5) Kekuatan dan kelemahan SKS (6) Kendala pelaksanaan sistem SKS di sekolah dan (7) Persepsi sekolah tentang program akselerasi, pengayaan, dan remedial dalam SKS.

2. Kajian Literatur

2.1 Pengertian Sistem Kredit dan Sistem Kredit Semester

Pemahaman kredit secara akademik menurut ensiklopedi Americana merupakan penghargaan institusi pendidikan akan keberhasilan peserta didik dalam menyelesaikan pembelajaran tertentu yang dinyatakan dengan angka spesifik. Angka spesifik tersebut pada umumnya didasarkan pada jumlah jam pelajaran perminggu. (Encyclopedia Americana, Grolier Incorporated, 1997, volume 8, hal.167).

Sistem kredit semester menjadi suatu hal yang penting pada komitmen pembaharuan pendidikan yang ditanda tangani 29 negara Eropah yang lebih dikenal dengan deklarasi Bologna. Menurut publikasi Evert Bisschop Boele (<http://www.esmae-ipp.pt/site/bolonha/Docs/HandbookfortheImplementationandUseofCreditPointsinHigherMusicEducation.pdf>) pada halaman 4 mendefinisikan : “ *a credit-point system is a system in which the total volume of study carried out by a student during the year (thought time plus independent study time) is given a numerical value. This value is then subdivided to correspond to the various subjects, unit or modules which the student take.* Dapat diterjemahkan dengan pemahaman: sistem kredit poin sebagai sebuah sistem yang mana isi seluruh pembelajaran yang dilaksanakan oleh siswa selama tahun itu (jam tatap muka ditambah jam belajar mandiri) diberi bobot dalam bentuk angka. Bobot tersebut selanjutnya dibagi sesuai dengan mata pelajaran tertentu yang diikuti oleh peserta didik.

Di Indonesia sistem kredit telah diberlakukan di seluruh perguruan tinggi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan: “Administrasi akademik pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester” (<http://dikti.or.id>). Penjelasan ayat tersebut menyatakan bahwa sistem kredit semester adalah suatu sistem

penyelenggaraan pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester. Banyaknya satuan kredit semester yang diberikan untuk mata kuliah, atau kegiatan proses belajar-mengajar lainnya, adalah besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha menyelesaikan kegiatan akademik yang bersangkutan. Kegiatan akademik meliputi tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapangan, penulisan skripsi, tesis dan sebagainya. Dalam satu kegiatan akademik diperhitungkan tidak hanya kegiatan tatap muka yang terjadwal tetapi juga kegiatan yang direncanakan (terstruktur) dan yang dilakukan secara mandiri. Sistem kredit semester diterapkan agar memungkinkan perguruan tinggi melaksanakan penyajian program studi yang beraneka ragam dan luwes, serta agar dapat memberi kesempatan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih dan melaksanakan program studi, sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dipunyai.

Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya

suatu program pendidikan. Satu semester setara dengan 16-19 minggu. satuan kredit semester (sks) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif suatu program, serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan khususnya bagi tenaga pengajar. Tujuan utama dari sistem kredit adalah agar mahasiswa dapat menempuh pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya. Mahasiswa yang lebih cakap dan lebih giat belajar dapat menyelesaikan studinya dalam waktu yang relatif singkat serta memungkinkan perguruan tinggi melaksanakan penyajian program studi yang beraneka ragam dan luwes (<http://bdg.centrin.net.id>). Di samping tujuan di atas penerapan sistem sks juga dimaksudkan untuk mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antara jurusan, antara bagian, atau antara fakultas dalam suatu perguruan tinggi, serta memungkinkan perpindahan

mahasiswa antar perguruan tinggi (<http://fmipa.ugm.ac.id>).

Sistem kredit semester di sekolah menengah menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi di dalam Bab III Tentang Beban Belajar dikatakan bahwa: “Sistem Kredit Semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem kredit semester dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar satu sks meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri”.

2.2 Ciri-Ciri Sistem Kredit Semester

Dalam sistem kredit tiap-tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit. Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan atas besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, praktikum, kerja lapangan, maupun tugas lain. Sedangkan konsep perhitungan SKS didasarkan pada beban belajar dalam satuan waktu. Sebagai gambaran menurut Boele jika

diperkirakan peserta didik belajar selama 42 minggu per-tahun dan setiap minggu terlaksana 40 jam maka total waktu untuk belajar terpakai 1680 jam. Diasumsikan ada 5 mata pelajaran dengan beban yang setara dapat diselesaikan selama periode tersebut, setiap mata pelajaran terlaksana pembelajaran tatap muka sekali seminggu dengan durasi 2 jam. Selain pembelajaran tatap muka juga diperkirakan 6 jam belajar mandiri setiap minggunya, sehingga untuk setiap bidang studi siswa belajar 8 jam perminggu. Selama satu tahun (42 minggu) siswa membutuhkan waktu 336 jam per bidang studi (8 jam x 42 minggu), atau 1680 jam untuk 5 bidang studi. Jika beban belajar 1680 jam diberi nilai 60 SKS. Tiap mata pelajaran mempunyai 12 sks seperti pada tabel 1. Beban belajar 1 (satu) sks menurut Tabel 1 adalah 28 jam.

Di perguruan tinggi di Indonesia, beban studi 1 (satu) sks bagi mahasiswa adalah 170 menit terdiri dari 50 menit kegiatan tatap muka, 60 menit kegiatan akademik terstruktur, dan 60 menit kegiatan akademik mandiri. Kegiatan akademik terstruktur adalah kegiatan di luar tatap muka terjadwal tetapi ditugaskan oleh dosen berupa pekerjaan rumah dapat berbentuk pembuatan laporan atau makalah, membaca literatur untuk

Tabel 1: Contoh Perhitungan SKS

	Jumlah tatap muka/ minggu	Belajar Mandiri	Jumlah belajar/ Minggu	Jumlah belajar/ tahun	SKS
Mata Pelajaran A	2	6	8	336	12
Mata Pelajaran B	2	6	8	336	12
Mata Pelajaran C	2	6	8	336	12
Mata Pelajaran D	2	6	8	336	12
Mata Pelajaran E	2	6	8	336	12
Total	10	30	40	1680	60

Sumber: *Handbook for the Implementation and Use of Credit Points in Higher Music Education* halaman 4

dipresentasikan, atau bentuk kegiatan lain. Sedangkan kegiatan mandiri adalah kegiatan belajar yang diatur dan dilaksanakan mahasiswa atas inisiatifnya sendiri untuk menambah wawasan pengetahuan dan sekaligus untuk menunjang kegiatan tatap muka serta tugas terstruktur. Bagi dosen 1 (satu) sks menunjukkan besar dan banyaknya tugas yang harus dilaksanakan dalam tiap minggu yang meliputi 3 (tiga) kegiatan, yaitu : 50 menit kegiatan tatap muka terjadwal dengan mahasiswa; 60 menit kegiatan akademik terstruktur, berupa perencanaan kegiatan mengajar dan memeriksa tugas-tugas yang dibebankan kepada mahasiswa dan 60 menit kegiatan mandiri untuk pengembangan materi kuliah (<http://www.unsa.ac.id>).

Di sekolah menengah ketentuan mengenai beban belajar didasarkan

pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 10 yang menyatakan bahwa beban belajar terdiri dari waktu tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik. Sedangkan kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar

kompetensi, waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik. Jumlah waktu beban belajar pada sistem paket di SMP terdiri dari tatap muka ditambah penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri maksimal 50% dari tatap muka. Sedangkan di SMA beban belajar terdiri dari 1(satu) jam tatap muka ditambah penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri maksimum 60%. Durasi 1 (satu) jam pembelajaran di SMP adalah 40 menit, sedangkan di SMA adalah 45 menit. Berdasarkan ketentuan ini beban belajar Mata Pelajaran Agama 2 jam pembelajaran tatap muka adalah 120 menit yang terdiri dari tatap muka 80 menit ditambah 40 menit (50%) tugas terstruktur dan kegiatan mandiri.

Tabel 2: Contoh Perhitungan Beban belajar Dengan sistem Paket di SMP dan SMA

SMP				SMA			
Beban Belajar				Beban Belajar			
Mata Pelajaran	TM)*	PT + KM)*	Waktu (menit)	Mata Pelajaran	TM)*	PT + KM)*	Waktu (menit)
1. Agama	2	1	120	1. Agama	2	1,2	144
2. PKn	2	1	120	2. PKn	2	1,2	144
3. B. Indonesia	4	2	240	3. B. Indonesia	4	2,4	288
4. B. Inggris	4	2	240	4. B. Inggris	4	2,4	288
5. Matematika	4	2	240	5. Matematika	4	2,4	288
6. IPA	4	2	240	6. Fisika	2	1,2	144
7. IPS	4	2	240	7. Biologi	2	1,2	144
8. Seni Budaya	2	1	120	8. Kimia	2	1,2	144
9. Penjaskes	2	1	120	9. Sejarah	1	0,6	72
10. TIK	2	1	120	10. Geografi	1	0,6	72
B. Muatan Lokal	2	1	120	11. Ekonomi	2	1,2	144
Jumlah	32	16	1920	12. Sosiologi	2	1,2	144
				13. Seni Budaya	2	1,2	144
				14. Penjaskes	2	1,2	144
				15. TIK	2	1,2	144
				16. Muatan Lokal	2	1,2	144
				Jumlah	38	22,8	2736

Keterangan tabel:

- Jumlah Tatap muka dikutip dari Struktur Kurikulum pada Permen No 22 tahun 2005 tentang Standar Isi SMP kelas VII dan SMA kelas X semester 1
-)* dalam satuan jam pelajaran
- TM = Tatap muka; PT = Penugasan Terstruktur; KM = Kegiatan Mandiri

Sedangkan di SMA, 2 jam pembelajaran tatap muka menjadi 144 menit yang terdiri dari 90 menit tatap muka ditambah 54 menit (60%) tugas terstruktur dan kegiatan mandiri. Dengan cara yang sama perhitungan beban belajar di SMP dan SMA dengan sistem paket seperti Tabel 2.

Sama halnya dengan sistem paket, beban belajar dengan sistem satuan kredit semester (SKS) didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi menyatakan bahwa beban belajar terdiri dari tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri. Alokasi waktu beban belajar 1 (satu) sks di SMP dan SMA terdiri dari 1 jam tatap muka ditambah 1 jam penugasan terstruktur ditambah 1 jam kegiatan mandiri. Oleh karena itu beban belajar 1 (satu) sks di SMP adalah 120 menit yang terdiri dari 40 menit tatap muka, 40 menit penugasan terstruktur, dan 40 menit kegiatan mandiri. Mata Pelajaran Agama di SMP sebanyak 2 sks adalah 6 jam (240 menit) yang terdiri dari tatap muka 2 jam (80 menit) tugas terstruktur 2 jam (80 menit) dan kegiatan mandiri 2 jam (80 menit).

Sedangkan di SMA, 1 (satu) sks adalah 135 menit yang terdiri dari 45 menit tatap muka, 45 menit

penugasan terstruktur, dan 45 menit kegiatan mandiri. Berdasarkan ketentuan ini beban belajar Pendidikan Agama 2 sks menjadi 270 menit yang terdiri dari tatap muka 2 jam (90 menit) ditambah 2 jam (90 menit) tugas terstruktur ditambah 2 jam (90 menit) kegiatan mandiri. Dengan cara yang sama perhitungan beban belajar di SMP dan SMA dengan SKS seperti Tabel 3 dan Tabel 4.

2.3 Kekuatan dan Kelemahan Sistem Satuan Kredit Semester

Boele merinci beberapa kekuatan penyelenggaraan SKS yaitu: (a) adanya fleksibilitas struktur kurikulum yang dapat menonjolkan subjek yang dipilih peserta didik pada saat tertentu dan pada saat yang lain, dapat mengubah subjek lama menjadi baru sesuai dengan perkembangan jaman disertai dengan penjelasan mengapa unsur itu ditambah dan mengapa dihilangkan; (b) fleksibilitas waktu dimana setiap subjek dapat dicapai dalam waktu yang berbeda-beda, sehingga dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang berbeda-beda pula; (c) mendorong peserta didik untuk mengenali diri mereka sendiri. Sedangkan kelemahan sistem ini menurut Boele hanya masalah administrasi yang agak rumit namun

Tabel 3: Contoh Perhitungan Beban belajar (TM, PT, dan KM) Dengan SKS di SMP

Mata Pelajaran	Sks	Beban Belajar (Jam Pelajaran)			
		TM	PT	KM	Jumlah
1. Agama	2	2	2	2	6
2. PKn	2	2	2	2	6
3.B. Indonesia	4	4	4	4	12
4. B. Inggris	4	4	4	4	12
5. Matematika	4	4	4	4	12
6. IPA	4	4	4	4	12
7. IPS	4	4	4	4	12
8. Seni Budaya	2	2	2	2	6
9. Penjaskes	2	2	2	2	6
10. Keterampilan	2	2	2	2	6
11. TIK	2	2	2	2	6
12. Muatan Lokal	2	2	2	2	6
Jumlah	34	34	34	34	102

Sumber: Pedoman Penyelenggaraan Sistem Satuan Kredit Semester, Untuk SMP/ MTs dan SMA/MA, Pusat Kurikulum 2007, Hal 15

Keterangan: TM = Tatap muka; PT = Penugasan Terstruktur; KM = Kegiatan Mandiri

Tabel 4: Contoh Perhitungan Beban belajar (TM, PT, dan KM) Dengan SKS di SMA Program IPA

Kelompok	Mata pelajaran	sks	Beban Belajar (Jam Pelajaran)			
			TM	PT	KM	Jumlah
MPDU (Mata Pelajaran Dasar Umum)	1. Agama	6	6	6	6	18
	2. PKn	6	6	6	6	18
	3. Bahasa Indonesia	9	9	9	9	27
	4. Bahasa Inggris	9	9	9	9	27
	5. Matematika Dasar	6	6	6	6	18
	6. Penjaskes	3	3	3	3	9
	7. Apresiasi Seni	3	3	3	3	9
MPWP (Mata Pelajaran Wajib Program)	8. Mat.Lanjutan	20/10	20/10	20/10	20/10	60/30
	9. Fisika	20/10	20/10	20/10	20/10	60/30
	10. Biologi	20/10	20/10	20/10	20/10	60/30
	11.Kimia	20/10	20/10	20/10	20/10	60/30
MPP (Pilihan)	12.	18	18	18	18	54
Jumlah		120	120	120	120	360

Sumber: Pedoman Penyelenggaraan Sistem Satuan Kredit Semester, Untuk SMP/ MTs dan SMA/MA, Pusat Kurikulum 2007, Hal 15

Keterangan: TM = Tatap muka; PT = Penugasan Terstruktur; KM = Kegiatan Mandiri

bila dipersiapkan dengan matang hal ini dapat diatasi.

Pada Penjelasan atas Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan tersirat kekuatan Penerapan sistem satuan kredit semester (SKS) di sekolah menengah untuk mengakomodasi bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Dengan SKS ini diharapkan tersedianya berbagai fasilitas untuk mengembangkan bakat berupa kegiatan ekstrakurikuler dan keterampilan, tersedianya berbagai jenis jurusan dan mata pelajaran pilihan sesuai dengan minat peserta didik, serta adanya pilihan mata pelajaran dengan berbagai tingkat kesulitan untuk mengakomodasi kemampuan peserta didik. Dampak lain peserta didik dapat menyelesaikan studi lebih cepat atau kurang dari 6 semester.

Penerapan SKS di sekolah menengah paling tidak mempunyai tiga konsekuensi yaitu penyesuaian struktur kurikulum, profesionalisme guru dan kemandirian peserta didik. Kemandirian peserta didik sangat sulit ditingkat SMP bahkan mungkin di kelas awal tingkat SMA (Surya, 12 Maret 2007). Dari berbagai sumber di perguruan tinggi Penerapan SKS mempunyai beberapa kekuatan antara lain: (a) memberi kesempatan

pada mahasiswa yang cakap dan giat belajar dapat menyelesaikan studi lebih cepat; (b) mengambil mata kuliah sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; (c) mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (d) memberi kemungkinan pengalihan (transfer) kredit antar program studi atau antar fakultas dalam suatu perguruan tinggi atau antar perguruan tinggi; (e) memungkinkan perpindahan mahasiswa antar perguruan tinggi atau antar program studi dalam suatu perguruan tinggi tertentu (<http://www.unsa.ac.id>).

3. Metodologi

Berdasarkan tujuan penelitian yang diuraikan di atas, maka penelitian ini merupakan penelitian eksplorasi yang dianalisis secara deskriptif. Data diperoleh berdasarkan angket dan diskusi fokus secara kelompok.

Pemilihan lokasi studi berdasarkan keberadaan daerah dan sekolah yang melaksanakan uji coba SKS yaitu 17 SMA Nusa Tenggara Barat (NTB). Disamping itu pada beberapa SMA dan SMP di DKI Jakarta yang berkeinginan menguji cobakan SKS.

Sasaran studi berjumlah 64 orang yang terdiri dari staf dinas

pendidikan yang menangani program SKS, kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru mata pelajaran dan pakar dari perguruan tinggi yang menjadi nara sumber atau patner sekolah di Mataram dan Jakarta

4. Hasil Studi dan Pembahasan

4.1. Pengertian SKS yang dipahami oleh sekolah

Melalui angket dan diskusi fokus, umumnya responden menyatakan bahwa sistem satuan kredit semester adalah sistem pembelajaran yang yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester. Beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem kredit semester dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Menurut responden jumlah sks tiap-tiap peserta didik ditentukan berdasarkan kemampuannya dan jenis mata pelajaran berdasarkan minat. Ditemukan dalam studi ini bahwa masing-masing sekolah memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang beban belajar 1 (satu) sks. Beban belajar kurang dipahami sebagai tiga unsur yaitu tatap muka, tugas terstruktur, dan kegiatan mandiri. Responden cenderung menafsirkan beban belajar hanya tatap muka saja. Sehingga banyak sekolah menyusun struktur

program antara 8 jam sampai 10 jam pembelajaran tatap muka dalam sehari. Padahal bila merujuk Permen Nomor 22, apabila tatap muka 8 jam, maka dalam sehari beban belajar adalah 24 jam yang terdiri dari 8 jam tatap muka, 8 jam penugasan terstruktur dan 8 jam kegiatan mandiri. Tentunya hal ini tidak mungkin terjadi.

Umumnya responden tidak dapat mengemukakan perbedaan beban belajar antara SKS dengan sistem paket. Responden menyatakan beban belajar tidak berubah yang berubah adalah setiap peserta didik diberi layanan individual. Ditemukan variasi jumlah alokasi waktu beban belajar ketika ditanyakan tentang perbandingan jumlah tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri, termasuk sekolah-sekolah di Mataram yang sudah melaksanakan SKS. Sebagian besar kepala sekolah dan guru di SMA menyatakan alokasi waktu untuk tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri berturut-turut adalah 90 menit, 45 menit, dan 45 menit; 45 menit, 30 menit, dan 30 menit. Sebagian responden mengatakan 40 menit, 30 menit, dan 30 menit. Demikian di SMP mereka menyatakan berbeda-beda yaitu 40 menit, 20 menit, dan 20 menit; 40 menit, 10 menit, dan 10

menit, 30 menit, 30 menit, dan 30 menit; 20 menit, 20 menit, dan 20 menit. Beragamnya pendapat responden tentang beban belajar ini sulit dipahami mengingat Permen Nomor 22 tentang Standar Isi tahun 2006 tersebut sudah disosialisasi ke sekolah.

4.2 Persepsi sekolah tentang esensi atau manfaat SKS.

Hasil studi menunjukkan bahwa persepsi sekolah tentang manfaat penerapan SKS antara lain:

- a. Memberi kesempatan pada peserta didik yang pandai lebih cepat menyelesaikan studinya
Seluruh responden menyatakan bahwa penerapan SKS membuat peserta didik yang pandai menyelesaikan studi kurang dari enam semester atau tiga tahun. Peluang menyelesaikan studi lebih cepat sangat besar mengingat jumlah sks yang diambil oleh peserta didik ditentukan oleh usahanya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Sebaliknya bagi peserta didik yang kemampuannya kurang dapat memilih sks minimal yang diperuntukkan selama enam semester.
- b. Peserta didik dapat memilih mata pelajaran sesuai dengan

kemampuannya

Menurut responden sekolah memfasilitasi peserta didik dengan mata pelajaran wajib dan pilihan dalam berbagai tingkat kesulitan apakah dalam kategori level tinggi dengan jumlah sks yang lebih besar atau level standar. Peserta didik akan memilih tingkat kesulitan sesuai dengan kemampuannya.

- c. Peserta didik dapat memilih mata pelajaran sesuai dengan minatnya
Sekolah memfasilitasi peserta didik dengan sejumlah mata pelajaran pilihan yang memberi kesempatan pada peserta didik untuk pengembangan dirinya dapat memilih mata pelajaran sesuai dengan minatnya dalam porsi yang lebih besar
- d. Melatih peserta didik lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam belajar
Sebagai dampak penerapan SKS ini peserta didik lebih mandiri dan bertanggung jawab. Hal ini terjadi karena sejak awal peserta didik sudah terlibat dalam merencanakan program pendidikannya sendiri antara lain menentukan beban belajarnya semester. Menurut responden peserta didik

- turut menentukan jumlah sks, jumlah mata pelajaran, dan memilih mata pelajaran yang diminati. Masing-masing peserta didik mungkin akan mempunyai beban belajar yang berbeda dengan teman-temannya. Oleh karena itu peserta didik akan lebih bertanggung jawab terhadap pilihannya dan akan merancang cara belajarnya sendiri.
- e. Menumbuhkan kedewasaan dalam berfikir
Di Mataram, sebagai daerah yang sudah dua tahun melaksanakan program ini menyatakan bahwa dampak SKS adalah secara perlahan kedewasaan dalam berfikir mulai tumbuh karena mereka mau menerima diri mereka apa adanya (kekurangan dan kelebihan).
 - f. Menghapus kekecewaan peserta didik karena tidak naik kelas
Menurut guru di Mataram kekecewaan peserta didik karena tidak naik kelas dapat dihilangkan karena SKS tidak mengenal istilah tinggal kelas. Apabila program remedial dapat dilaksanakan dengan baik, peserta didik dapat seluruhnya selesai dalam waktu tiga tahun, bahkan menurut guru terdapat peningkatan nilai yang signifikan setiap semesternya.
 - g. Mengubah pola mengajar guru dan belajar peserta didik
Karena sejak awal peserta didik sudah dilibatkan dalam merencanakan program belajarnya menimbulkan dampak perubahan pola belajar mereka menjadi lebih aktif dan kreatif baik dalam mencari informasi dari berbagai media maupun bertanya pada guru. Pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dengan tantangan ini menurut responden, guru menjadi lebih termotivasi meningkatkan kompetensinya.

4.3 Penerapan SKS di SMP/MTs

Sampai tahun ajaran 2007/2008 belum ditemukan SMP yang menyelenggarakan sistem satuan kredit semester. Hampir semua responden menyatakan belum layak apabila SKS diterapkan juga di SMP karena SMP merupakan wajib belajar dan mata pelajaran yang disajikan masih bersifat umum dan beberapa mata pelajaran terintegrasi. Lebih lanjut responden menyatakan bagi peserta didik usia 15 tahun di SMP relatif sulit karena pada usia ini kemandirian anak belum terbentuk sehingga bila SKS diterapkan di SMP dibutuhkan

bimbingan intensif dari konselor, guru, maupun orang tua. Walaupun saat ini banyak SMP yang menyelenggarakan program akselerasi responden berpendapat SKS di SMP tidak perlu dilaksanakan secara massal mengingat permasalahan yang ditemui pada penyelenggaraan SKS di SMA. Selain itu jumlah beban belajar yang banyak seperti dituangkan dalam Tabel 3 sangat berat bagi peserta didik SMP umumnya. Hal ini dapat dipahami mengingat isi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 11 bahwa program SKS di SMP tidak diwajibkan tetapi merupakan pilihan bagi sekolah kategori mandiri dan bertaraf internasional.

4.4 Penerapan SKS di SMA/MA

Seluruh responden berpendapat bahwa penerapan SKS di SMA/MA sangat tepat mengingat selama ini di sekolah sudah dilaksanakan program akselerasi. Dengan SKS secara tidak langsung sudah membentuk wadah program akselerasi yang lebih efisien karena adanya pelayanan individual bagi peserta didik. Berbagai hal berikut menurut responden menguatkan pilihan SKS di SMA yaitu beban belajar berkurang ditandai dengan jumlah mata

pelajaran tiap semesternya tidak sebanyak pada sistem paket, peserta didik lebih terfokus pada mata pelajaran yang diminatinya sehingga dapat berkembang lebih optimal, peserta didik dibebaskan memilih sehingga mereka menjadi memiliki kemampuan menganalisa, kritis, dan membuat keputusan yang tepat, serta orientasi jurusan yang akan diambil di perguruan tinggi sudah jelas dan dipersiapkan dengan baik melalui pilihan mata pelajaran.

4.5 Kekuatan dan Kelemahan pelaksanaan SKS

Hampir semua responden menyatakan kekuatan pelaksanaan SKS di sekolah menengah adalah peserta didik dapat lebih fleksibel dan bervariasi dalam menentukan dan mengatur strategi belajarnya, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengatur program studinya agar dapat menyelesaikan pelajarannya sesuai dengan kondisi dan keinginannya, memberikan kesempatan kepada peserta didik mengikuti pelajaran sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Responden di Mataram yang sudah melaksanakan SKS menambahkan bahwa kekuatan lain adalah peserta didik mandiri dalam belajar, memberi peluang peserta didik untuk berkompetisi, memotivasi

peserta didik untuk belajar aktif, pelaksanaan belajar tuntas dapat berlangsung dengan baik, hasil pembelajaran dapat diketahui secara langsung dan dapat memberi kontribusi untuk menimbulkan kemauan belajar yang tinggi. Bagi sekolah tidak sulit bila menghadapi mutasi peserta didik antar sekolah sesama pelaksana SKS. Sedangkan bagi guru sistem ini merangsang mereka untuk meningkatkan kompetensi mengajar dan perhatian terhadap peserta didik lebih terfokus. Menurut responden sekolah dapat meluluskan dua kali dalam setahun sebenarnya merupakan kekuatan tetapi karena belum diakomodasi oleh perguruan tinggi dan ujian nasional menjadi sia-sia.

Walaupun responden merasakan banyak kekuatan sistem SKS bila dibandingkan dengan sistem paket yang selama ini dijalankan namun ditemukan beberapa kelemahan antara lain sistem administrasi yang agak rumit meliputi pembuatan jadwal pelajaran sesuai dengan pilihan peserta didik, pengaturan jadwal guru apalagi kalau jumlah guru terbatas, pengelolaan ruang belajar dan menetapkan jumlah SKS yang akan diambil setiap peserta didik. Pengelolaan fasilitas belajar dan sumber daya pendidikan yang selalu

mengacu pada perkembangan situasi periode belajar tertentu sehingga setiap tahun dapat berubah sesuai dengan minat peserta didik pada saat itu. Menurut responden kesiapan guru dan sekolah merupakan kelemahan juga karena beban guru akan bertambah dikaitkan dengan beban belajar tatap muka ditambah dengan tugas terstruktur dan tugas mandiri peserta didik yang harus dikelola dengan baik. Peserta didik masih perlu bimbingan dalam menentukan pilihan mata pelajaran. Kelemahan lain adalah waktu belajar peserta didik menjadi lebih banyak. Menurut guru tidak semua peserta didik mampu mengikuti sistem sks dengan baik karena dituntut untuk belajar mandiri dan banyak pula. Kelemahan lain adalah dapat terjadi penumpukan peserta didik pada mata pelajaran tertentu yang banyak diminati sehingga terjadi kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu yang banyak diminati sebaiknya sedikit pada mata pelajaran lain hal ini menyebabkan ada guru yang *over loaded* dan sebaliknya ada yang santai. Kenyataan ini menimbulkan masalah tersendiri dalam penggajian guru sebab semakin sedikit mengajar penghasilan berkurang.

Selama dua tahun pelaksanaan SKS di Mataram menurut responden

kenyataan yang belum mendukung ini menimbulkan kejenuhan bagi beberapa guru. Bila disimak kembali ketentuan pelaksanaan SKS di PP no 19 tahun 2005 dikatakan bahwa yang menyelenggarakan sistem sks adalah diwajibkan pada sekolah kategori mandiri dan sekolah bertaraf internasional, seyogianya bagi sekolah yang belum pada kategori ini tidak memaksakan diri. Oleh karena itu sebelum sistem ini diberlakukan diperlukan persiapan yang matang untuk meminimalkan kelemahan ini.

4.6 Kendala yang ditemui pada pelaksanaan SKS

Sebagai pelaksana pertama sistem SKS di Indonesia, responden di Mataram merasakan beberapa kendala pada pelaksanaan SKS utamanya adalah belum selarasnya dengan ujian masuk perguruan tinggi untuk menampung lulusan di tengah tahun ajaran. Hal ini menyebabkan peserta didik tetap melanjutkan pada semester ganjil berikutnya walau sebagian peserta didik ada yang sudah selesai 2,5 tahun. Pelaksanaan ujian nasional yang dilakukan hanya sekali setahun sedangkan dengan SKS peserta didik dapat selesai pada pertengahan tahun. Kendala lain adalah sumber daya manusia (SDM) di sekolah yang belum mampu

mendesain struktur kurikulum dengan substansinya serta mata pelajaran pilihan.

Pada beberapa sekolah terdapat beberapa kendala antara lain pemahaman stakeholder sekolah (guru, pegawai administrasi, komite dan orangtua) tentang SKS masih kurang, belum siapnya sekolah dengan pengaturan administrasi yang agak rumit dan banyak, sarana-prasarana yang mendukung belum memadai khususnya jumlah ruang kelas, dana pengelolaan yang terbatas sedangkan kegiatan banyak. Kendala lain adalah mengubah pola mengajar guru dan pola belajar peserta didik dimana nuansa sekolah masih dipengaruhi sistem lama. Pembagian tugas guru menjadi kendala karena tidak ada wali kelas, seolah-olah semua menjadi tanggung jawab bidang kurikulum untuk membantu peserta didik mengisi kartu rencana belajar setiap peserta didik. Melihat berbagai kendala ini perubahan sistem dari paket ke sistem sks memerlukan adaptasi yang cukup lama sehingga pada tahap awal kemungkinan terjadi kerumitan. Diperlukan sosialisasi terlebih dahulu kepada semua stakeholder sekolah. Menurut kepala sekolah di Mataram sosialisasi kepada orang tua membutuhkan energi tersendiri apalagi orang tua yang

tingkat pendidikannya kurang yang tidak memungkinkan membimbing anaknya untuk memilih program padahal di sekolah belum tersedia konseling yang memadai untuk menangani anak secara individual. Menghadapi peserta didik yang mutasi dari sekolah non SKS menjadi kerumitan tersendiri pula

4.7 Persepsi sekolah tentang program akselerasi, pengayaan, dan remedial dalam SKS

Semua responden menyatakan bahwa akselerasi tidak perlu lagi dilakukan karena kecepatan belajar peserta didik secara individu sudah terakomodasi dalam sistem SKS. Peserta didik mengambil sks sesuai dengan kemampuannya sehingga bagi peserta didik yang mampu tentu akan mengambil jumlah sks lebih banyak yang pada akhirnya akan mempercepat studinya. Sekolah yang melaksanakan program akselerasi perbedaan individual peserta didik belum dapat diakomodasi dengan baik karena mereka dikelompokkan dalam satu kelas namun dengan sistem sks secara individu mereka dapat dilayani.

Sedangkan pengayaan seluruh responden di Mataram menyatakan tidak diperlukan karena batas

ketuntasan belajar akan terpenuhi dengan nilai yang tinggi mengingat peserta didik yang mampu otomatis menguasai kompetensi yang lebih banyak dan lebih dalam dibandingkan dengan peserta didik yang kemampuannya biasa saja. Sebagian besar responden di Jakarta menyatakan pengayaan perlu untuk mengoptimalkan kemampuan dan menambah wawasan peserta didik dalam bentuk tugas terstruktur atau tugas mandiri. Bila disimak isi dari penjelasan pasal 11 ayat (1) PP 19 nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan: “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi satuan pendidikan yang berupaya untuk menerapkan sistem satuan kredit semester karena sistem ini lebih mengakomodasikan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Dengan diberlakukannya sistem ini maka satuan pendidikan tidak perlu mengadakan program penayaan karena sudah tercakup (built in) dalam sistem ini”. Isi penjelasan ini nampaknya belum sluruhnya dipahami oleh responden di Jakarta.

Tentang program remedial seluruh responden menyatakan sangat diperlukan bagi peserta didik yang lambat atau kurang mengingat kemampuan peserta didik berbeda-beda. Remedial dilakukan agar

ketuntasan belajar terpenuhi, memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mencapai hasil yang maksimal, membantu pemahaman peserta didik yang kesulitan menyelesaikan pelajaran, dan memperbaiki nilai. Menurut responden kegiatan remedial ini dilakukan pada semester pendek dalam bentuk tutorial.

5. Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Mengacu pada hasil studi, maka simpulan yang dirumuskan sebagai berikut.

Pengertian SKS yang dipahami oleh sekolah menunjukkan bahwa masing-masing sekolah memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang beban belajar 1 sks. Beban belajar kurang dipahami sebagai tiga unsur yaitu tatap muka, tugas terstruktur, dan kegiatan mandiri. Responden cenderung menafsirkan beban belajar hanya tatap muka saja. Responden juga menyatakan bahwa beban belajar SKS tidak berbeda dengan sistem paket yang berubah pada SKS adalah setiap peserta didik diberi layanan individual. paket. Responden kurang memahami isi Permen Nomor 22 tahun 2006 tentang beban belajar. Jawaban responden beragam tentang perbandingan beban belajar tatap

muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri yang tidak sesuai dengan isi Permen Nomor 22/2006.

Persepsi sekolah tentang esensi atau manfaat SKS adalah: (a) memberi kesempatan pada anak pandai lebih cepat menyelesaikan studinya; (b) peserta didik dapat memilih mata pelajaran sesuai dengan kemampuannya; (c) peserta didik dapat memilih mata pelajaran sesuai dengan minatnya; (d) melatih peserta didik lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam belajar; (e) menumbuhkan kedewasaan dalam berfikir; (f) menghapus kekecewaan peserta didik karena tidak naik kelas; (g) mengubah pola mengajar guru dan belajar peserta didik.

Pendapat sekolah tentang penerapan SKS di SMP/MTs kurang cocok karena SMP/MTS merupakan wajib belajar dan mata pelajaran masih bersifat umum. SKS di SMP/MTS hanya merupakan pilihan tidak diwajibkan termasuk bagi sekolah kategori mandiri dan bertaraf internasional karena kemandirian peserta didik belum terbentuk. Disamping itu dengan SKS beban belajar peserta didik bertambah artinya waktu belajar menjadi banyak. Sedangkan pendapat sekolah tentang penerapan SKS di SMA/MA menunjukkan sangat sesuai karena

secara tidak langsung sudah membentuk wadah program akselerasi yang lebih efisien, jumlah mata pelajaran tiap semesternya tidak sebanyak pada sistem paket dan orientasi jurusan yang akan diambil di perguruan tinggi sudah jelas dan dipersiapkan dengan baik.

Kekuatan SKS bagi peserta didik adalah: (a) lebih fleksibel dan bervariasi dalam menentukan dan mengatur strategi belajarnya; (b) memberi kesempatan untuk mengatur program studinya agar dapat menyelesaikan pelajarannya sesuai dengan kondisi dan keinginannya; (c) mandiri dalam belajar; (d) memberi peluang untuk berkompetisi; (e) memotivasi untuk belajar aktif; (f) pelaksanaan belajar tuntas dapat berlangsung dengan baik; (g) hasil pembelajaran dapat diketahui secara langsung dan dapat memberi kontribusi untuk menimbulkan kemauan belajar yang tinggi. Bagi sekolah tidak sulit bila menghadapi mutasi peserta didik antar sekolah sesama pelaksana SKS. Sedangkan bagi guru sistem ini merangsang mereka untuk meningkatkan kompetensi mengajar dan perhatian terhadap peserta didik lebih terfokus. Sedangkan kelemahan antara lain sistem administrasi yang agak rumit, pengelolaan fasilitas belajar dan

sumber daya pendidikan yang selalu mengacu pada perkembangan situasi periode belajar tertentu, kesiapan guru dengan beban guru yang bertambah, terjadinya penumpukan peserta didik pada mata pelajaran tertentu yang banyak diminati sehingga terjadi kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu yang banyak diminati.

Beberapa kendala yang ditemui pada penyelenggaraan SKS antara lain: (a) belum selarasnya dengan ujian masuk perguruan tinggi untuk menampung lulusan di tengah tahun ajaran; (b). pelaksanaan ujian nasional yang dilakukan hanya sekali setahun sedangkan dengan SKS anak dapat selesai pada pertengahan tahun; (c) SDM di sekolah yang belum mampu mendesain struktur kurikulum; (d) pemahaman stakeholder sekolah tentang SKS masih kurang; (e) belum siapnya sekolah dengan pengaturan administrasi yang agak rumit dan banyak; (f) sarana-prasarana belum memadai; (g) dana pengelolaan yang terbatas sedangkan kegiatan banyak; (h) mengubah pola mengajar guru dan pola belajar peserta didik; (i) pembagian tugas guru.

Program akselerasi tidak perlu lagi dilakukan karena kecepatan belajar peserta didik secara individu

sudah terakomodasi dalam sistem SKS. Pengayaan juga tidak diperlukan lagi sudah tercakup (built in) dalam SKS. Sedangkan remedial sangat diperlukan bagi peserta didik yang lambat atau kurang untuk memberi kesempatan mencapai hasil yang maksimal, dan memperbaiki nilai. Remedial yang dilakukan dengan baik dapat membantu peserta didik menyelesaikan studi selama 6 semester.

4.2 Saran

Mengacu pada simpulan studi, maka disarankan agar sosialisasi Permen Nomor 22 tahun 2006 untuk menyamakan persepsi tentang beban belajar perlu dilakukan secara menyeluruh oleh para birokrat yang ada di Pusat maupun daerah. Pemerintah Pusat perlu menyusun pedoman penyelenggaraan SKS untuk membantu daerah/sekolah memahami dan melaksanakan SKS. Sambil

menunggu perkembangan penerapan SKS di SMA/MA untuk saat ini penyelenggaraan SKS di SMP/MTs belum perlu dilaksanakan. Dalam penyelenggaraan SKS sekolah perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh *stakeholder* untuk menyamakan persepsi tentang Penerapan SKS. Di samping itu, perlu persiapan yang matang bagi sekolah yang akan melaksanakan SKS yang antara lain meliputi kelengkapan sarana dan prasarana termasuk menambah ruang kelas dan menyiapkan SDM yang memadai. Dalam persiapan tersebut diperlukan kesamaan pendapat terkait dengan pengertian satu sks bagi guru sebagaimana yang diterapkan pada perguruan tinggi. Sebagai konsekuensi logis, dapat dipertimbangkan adanya kemungkinan pelaksanaan ujian nasional dan masuk perguruan tinggi pada setiap semester untuk menampung peserta didik yang selesai lebih awal;

Pustaka Acuan

- Daryl Forde. 2007. *Konsep baru Pendidikan, Apakah Sekolah Kita Siap?*. The Jakarta Post 6 Mei 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- _____. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta.

- _____. 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi. Jakarta.
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB. 2005. *Buku I Pedoman Umum Sistem Kredit Semester pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Propinsi Nusa Tenggara Barat*. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB
- <http://suarantb.com>: 17 SMA terapkan Program SKS (Rabu 15 Desember 2004).
- <http://kompas.com>: Belajar Tuntas dan Mandiri Lewat SKS. (Senin 13 Desember 2004).
- <http://balipost.co.id>: Penerapan Sistem SKS di SMP dan SMA, Siswa Bisa Selesaikan Pendidikan lebih Cepat. (Senin 4 April 2005).
- <http://waspada.co.id>. Model SKS di SMA Menguntungkan Peserta Didik. (20 Agustus 2007).
- <http://pauaxxx.wordpress.com>, SKS Untuk SMA Penting Ga Sih (28 Juni 2007).
- <http://dispendik.surabaya.go.id>. SMAN 1 Surabaya Siapkan SKS, Luncurkan PAS. (4 September 2007).
- Encyclopedia Americana. 1997. Grolier Incorporated. Volume 8, hal.167
- <http://www.esmae-ipp.pt/site/bolonha/docs.pdf>. Boole, Evert Bisschop. 2004. *Handbook for the Implementation and Use of Credit Points in Higher Music Education*.
- <http://dikti.or.id>. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
- <http://bdg.centrin.net.id>. Sistem Kredit Semester
- (<http://fmipa.ugm.ac.id>). Sistem Kredit Semester
- <http://www.unsa.ac.id>. Satuan Kredit Semester / SKS.
- Pusat Kurikulum. 2007. *Pedoman Penyelenggaraan Sistem Satuan Kredit Semester Untuk SMP/MTs dan SMA/MA untuk Sekolah Kategori Mandiri dan Bertaraf Internasional*. Jakarta: Pusat Kurikulum.
- Sinar Harapan 17 Juli 2007. SMA Jakarta mulai Gunakan Sistem SKS.
- Rosidi Sakban (2007) Sistem Kredit dan Profesionalisasi Keguruan. (Surya, Senin 12 Maret 2007)